

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlawanan dan risiko yang dihadapi oleh Kelompok Tani Kampung Bayam Madani dalam menghadapi alih fungsi lahan sepihak di Jakarta Utara, dapat disimpulkan bahwa permasalahan ini merupakan salah satu contoh nyata dari konflik agraria di kawasan perkotaan. Perubahan tata guna lahan yang terjadi akibat pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) telah membawa dampak yang signifikan bagi kehidupan petani kota yang selama ini bergantung pada lahan tersebut untuk bertahan hidup. Konflik ini menggambarkan bagaimana dinamika pertarungan kepentingan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal dalam pengelolaan lahan di Jakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlawanan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Kampung Bayam Madani merupakan bentuk reaksi terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil dan merugikan mereka. Perlawanan ini dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk aksi demonstrasi, advokasi hukum, dan upaya membangun solidaritas dengan organisasi masyarakat sipil serta media. Berdasarkan teori *Repertoire of Contention* yang dikemukakan oleh Charles Tilly, strategi perlawanan kelompok tani berkembang sesuai dengan situasi yang mereka hadapi. Mereka tidak hanya mengandalkan satu metode aksi tetapi juga mengadaptasi berbagai taktik guna memperjuangkan hak mereka atas tanah yang telah mereka tempati dan garap selama bertahun-tahun. Dalam menghadapi tekanan ini, mereka tidak hanya melakukan perlawanan dalam bentuk demonstrasi terbuka dan aksi massa, tetapi juga dengan cara-cara yang lebih subtil dan sulit dideteksi oleh pihak berwenang. Jika dilihat dari perspektif James C. Scott dalam bukunya *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*, strategi perlawanan yang mereka gunakan dapat dikategorikan sebagai bentuk perlawanan sehari-hari yang dilakukan oleh kelompok subordinat dalam menghadapi dominasi pihak yang lebih kuat.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa alih fungsi lahan secara sepihak membawa berbagai risiko yang sangat berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi petani kota. Dengan menggunakan teori Masyarakat Risiko dari Ulrich Beck, penelitian ini mengungkap bagaimana modernisasi yang terjadi di kawasan perkotaan menimbulkan ketidakpastian bagi kelompok rentan seperti petani kota. Alih fungsi lahan tidak hanya menyebabkan kehilangan sumber penghidupan utama, tetapi juga menciptakan tekanan psikososial yang berujung pada marginalisasi ekonomi dan sosial mereka. Ketidakpastian terkait status hunian dan pekerjaan, serta ketimpangan dalam distribusi sumber daya, semakin memperparah kondisi kelompok tani yang terdampak.

Dari sisi sosial, penggusuran Kampung Bayam telah menyebabkan dislokasi komunitas dan hilangnya ikatan sosial yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Banyak petani yang kehilangan akses terhadap jaringan sosial yang sebelumnya mendukung kehidupan mereka, sehingga membuat mereka semakin sulit beradaptasi dengan kondisi baru. Selain itu, proses relokasi yang tidak jelas dan belum terealisasi sepenuhnya menambah ketidakpastian bagi mereka yang terdampak. Ketidakpastian ini semakin diperburuk oleh tidak adanya jaminan kesejahteraan dari pemerintah bagi warga yang terkena dampak penggusuran.

Dari segi ekonomi, kehilangan lahan pertanian telah mengakibatkan petani kehilangan sumber pendapatan utama mereka. Beberapa dari mereka terpaksa mencari pekerjaan lain di sektor informal yang belum tentu sesuai dengan keterampilan mereka. Hal ini memperbesar kemungkinan jatuhnya kelompok tani ke dalam kemiskinan struktural, di mana mereka tidak hanya kehilangan aset fisik tetapi juga kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Selain itu, ketergantungan kota terhadap pasokan pangan dari luar daerah juga semakin meningkat akibat berkurangnya lahan pertanian perkotaan, yang pada akhirnya berdampak pada ketahanan pangan di tingkat kota.

Dampak budaya dari alih fungsi lahan juga tidak dapat diabaikan. Identitas sosial petani kota sebagai bagian dari komunitas agraris mulai terkikis akibat penggusuran ini. Pengetahuan lokal tentang pertanian yang diwariskan dari

generasi ke generasi menjadi semakin sulit dipertahankan karena tidak adanya lahan untuk mengaplikasikan keterampilan tersebut. Generasi muda dari keluarga petani juga semakin enggan untuk melanjutkan profesi bertani karena melihat ketidakpastian yang dihadapi oleh orang tua mereka. Hal ini menunjukkan bagaimana urbanisasi dan modernisasi secara perlahan mengubah struktur sosial dan ekonomi masyarakat yang selama ini bergantung pada pertanian kota.

Penelitian ini juga menemukan bahwa perlawanan kelompok tani tidaklah mudah. Mereka menghadapi berbagai bentuk risiko, termasuk tekanan dari pihak berwenang, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap para aktivis yang berusaha memperjuangkan hak-hak mereka. Selain itu, lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak alih fungsi lahan semakin memperburuk kondisi mereka. Dalam beberapa kasus, proses birokrasi yang panjang dan kompleks menjadi hambatan utama bagi kelompok tani dalam memperoleh keadilan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa konflik agraria di kawasan perkotaan seperti yang terjadi di Kampung Bayam tidak hanya berkaitan dengan persoalan kepemilikan lahan, tetapi juga dengan ketimpangan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Perlawanan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Kampung Bayam Madani mencerminkan perjuangan masyarakat kecil dalam mempertahankan hak mereka di tengah kebijakan pembangunan yang cenderung menguntungkan pihak berkepentingan tertentu. Dengan demikian, diperlukan kebijakan yang lebih adil dan inklusif dalam mengelola lahan perkotaan agar kelompok masyarakat yang rentan tidak semakin terpinggirkan oleh proses urbanisasi yang tidak berimbang.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak terkait:

1. Pemerintah

- Perlu adanya kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat kecil, terutama dalam hal pengelolaan lahan perkotaan agar tidak terjadi penggusuran sepihak.
- Transparansi dalam proses pengambilan keputusan terkait alih fungsi lahan harus ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat terdampak dalam perencanaan dan implementasi kebijakan.
- Penyediaan kompensasi yang layak bagi warga yang terkena dampak penggusuran harus menjadi prioritas utama, baik dalam bentuk hunian yang layak maupun skema mata pencaharian alternatif.

2. Kelompok Tani dan Masyarakat Sipil

- Perlu meningkatkan koordinasi dan solidaritas antar kelompok tani di berbagai wilayah untuk memperkuat posisi mereka dalam negosiasi dengan pemerintah dan pihak swasta.
- Advokasi berbasis data dan pendekatan hukum harus lebih diperkuat untuk memperjuangkan hak-hak kelompok tani dalam menghadapi alih fungsi lahan sepihak.
- Edukasi masyarakat mengenai hak agraria dan strategi advokasi harus ditingkatkan agar masyarakat lebih siap menghadapi potensi konflik serupa di masa depan.

3. Akademisi dan Peneliti

- Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang dari penggusuran terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial petani kota.
- Pengembangan model kebijakan yang berkelanjutan dan inklusif dalam tata kelola lahan perkotaan perlu dikaji lebih dalam agar dapat menjadi solusi atas permasalahan serupa di masa depan.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bahwa wacana mengenai hak atas tanah dan keadilan agraria di kawasan perkotaan dapat semakin diperhatikan oleh berbagai pihak. Diperlukan langkah-langkah konkret yang berorientasi pada keadilan sosial agar masyarakat kecil tidak terus-menerus menjadi korban dari alih fungsi lahan yang tidak berpihak pada kepentingan mereka